

**PUBLIK PRIVATE PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMAN
EDUKASI HARUS DI DESA HARUS KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG**

Muhammad Samman Maulana*, Muhammad Noor

sammanmajalengka21@gmail.com ; mnoor@stiatabalong.ac.id

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung – Tabalong
Telp/Fax (0526) 2022484 Kode Pos 7012
Email: info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Konsep Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta membantu pemerintah mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam pengembangan pariwisata. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, tantangan seperti rendahnya komitmen perusahaan, komunikasi, dan partisipasi masyarakat perlu diatasi agar pariwisata dapat berkembang lebih baik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan *publik private partnership* dalam pengembangan desa wisata di Taman Edukasi Harus di Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *publik private partnership* dalam pengembangan desa wisata di Taman Edukasi Harus di Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang berjumlah 10 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif untuk menganalisis data hasil penelitian yaitu menggunakan *Data Collection, Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing/Verifying*. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pelaksanaan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan Desa Wisata Taman Edukasi Harus berjalan efektif, dengan penerapan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Kemitraan ini ditandai dengan perjanjian kerjasama yang jelas, pembagian tanggung jawab yang adil, serta keterlibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Meskipun prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik, masih terdapat kendala, seperti tantangan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan komitmen jangka panjang. Namun, kendala ini dapat diatasi melalui evaluasi rutin dan komunikasi yang efektif.

Kata Kunci: *Public Private Partnership, Pengembangan, Desa Wisata*

***PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF HARUS EDUCATIONAL PARK
TOURISM VILLAGE IN HARUS VILLAGE, MUARA HARUS SUB-DISTRICT, TABALONG
REGENCY***

ABSTRACT

The concept of Public Private Partnership (PPP) enhances the efficiency and effectiveness of public services and assists the government in overcoming budget and resource limitations in tourism development. However, to maximize its benefits, challenges such as low company commitment, communication, and community participation need to be addressed so that tourism can develop better. This research aims to identify the implementation process of public-private partnerships in the development of the tourism village at the Harus

Educational Park in Harus Village, Muara Harus Sub-district, Tabalong Regency, South Kalimantan. It also aims to identify the obstacles encountered in the implementation process of public-private partnerships in the development of the tourism village at the Harus Educational Park in Harus Village, Muara Harus Sub-district, Tabalong Regency, South Kalimantan. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques 1 included observation, documentation, and interviews with 10 informants. The data analysis technique used in this research employs an interactive model to analyze the research data, namely using Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing/Verifying. Based on the discussion of the research results, it can be concluded that the implementation of public-private partnerships in the development of the Harus Educational Park Tourism Village is running effectively, with the application of the principles of equality and transparency. This partnership is characterized by clear cooperation agreements, fair division of responsibilities, and active involvement of all parties in decision-making and evaluation. Although these principles have been well implemented, there are still obstacles, such as coordination challenges, limited resources, and long-term commitment. However, these obstacles can be overcome through regular evaluation and effective communication.

Keywords: *Public Private Partnership, Development, Tourism Village*

PENDAHULUAN

Pada saat ini para wisatawan mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya sekedar menyajikan keindahan alamnya saja tetapi lebih kepada interaksi masyarakat. Oleh karena itu mulai berkembang jenis wisata minat khusus, yaitu wisata alternatif yang disebut desa wisata. Desa wisata ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur-unsur pengalaman dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat setempat. Dengan menonjolkan ciri kelokalan budaya setempat diharapkan desa wisata ini mampu bersaing dengan tempat wisata lain.

Pembangunan sektor pariwisata perlu dilakukan secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar dengan adanya kegiatan pariwisata dapat mendorong masyarakat secara aktif dalam pembangunan untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Pembangunan sektor pariwisata ini merupakan suatu kegiatan yang menggali segala potensi pariwisata, yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang apabila digabungkan dan dikelola dengan baik akan memberikan manfaat bagi keduanya. Bisa dikatakan bahwa kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang melibatkan Masyarakat.

Tentu daerah yang memiliki potensi wisata harus selalu dipantau dan dikembangkan, Salah

satu daerah yang memiliki potensi wisata ialah Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang begitu banyak menyimpan berbagai macam potensi wisata yang terkandung didalamnya, sehingga Kabupaten Tabalong ini banyak dijadikan sebagai tempat berwisata di wilayah Kalimantan Selatan, tidak hanya dari Kalimantan Selatan. Tidak heran jika wisatawan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan banyak datang ke Kabupaten Tabalong sebagai tujuan untuk berwisata sebab di Kabupaten Tabalong memiliki beragam tempat wisata seperti wisata alam, maupun wisata-wisata unik lainnya yang terletak di pedesaan.

Salah satu desa wisata yang memiliki potensi wisata yang besar untuk dikembangkan adalah Desa Harus yang berada di Kecamatan Muara Harus. Desa wisata yang dikembangkan di Desa Harus adalah dalam bentuk taman wisata edukasi. Taman Edukasi Harus dibangun menggunakan dana desa tahun anggaran 2021 dan dana desa tahun 2022, yang pengelolaannya dilakukan oleh badan usaha milik desa (bumdes) karya bersama desa harus dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Taman edukasi harus yang diresmikan tahun 2022 oleh Bupati Kabupaten Tabalong. Adapun Peresmian ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Tabalong yang disaksikan Camat Muara Harus, Kepala Desa

Harus, DPRD Dapil Selatan, serta jajaran Kepala SKPD Lingkup Pemkab Tabalong.

Padahal Taman Edukasi Harus mempunyai letak yang strategi, yaitu selain letaknya tepat bersebarangan dengan Kantor Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, juga taman edukasi harus ini sangat dekat dengan ring 1 kegiatan PT. Adaro Indonesia karena desa sangat dekat dengan jalan hauling. Oleh sebab itu karena letaknya berdekatan dengan aktifitas PT. Adaro Indonesia, maka terjadilah pola publik private partnership dalam melakukan pengembangan taman edukasi harus tersebut. Kehadiran PT. Adaro Indonesia, tentu menjadi jalan mudah bagi pemerintah Desa Harus dalam pengembangan taman edukasi harus, terutama dalam hal pendanaan dan promosi wisata desa

Berdasarkan hasil observasi awal di Taman Edukasi Harus menunjukkan bahwa pola kemitraan tidak berjalan dengan baik. Ini dibuktikan dengan fakta bahwa PT. Adaro hanya memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemberi CSR tetapi tidak melakukan tugasnya sebagai mitra desa Harus. Dampak positif dari keberadaan Taman Edukasi Harus adalah peningkatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja bagi warga Desa Harus, tetapi manfaat ini hanya berlangsung tidak lama, dikarenakan sekarang Taman Edukasi Harus Sangat sepi pengunjung dan kondisinya pun lumayan memprihatinkan. Fasilitas-fasilitas pendukung wisata yang ada pun tidak terawat, hal ini yang membuat Taman Edukasi Harus menjadi sepi pengunjung. Kemudian hal ini juga menjadikan ekonomi lokal yang bergantung pada taman ini menurun sampai semua yang berjualan ditaman ini tutup.

Berdasarkan wawancara awal dengan kepala desa Harus mengatakan bahwa selama ini sinkronisasi kebijakan yang baik antara pemerintah dan dunia usaha belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kemudian bentuk komitmen perusahaan serta komunikasi dan partisipasi masyarakat yang rendah juga menjadi penghambat dalam efektivitas penerapan program CSR.

Sehingga penerapan pola kerjasama dan kemitraan yang baik penting untuk dilakukan.

Konsep *public private partnership* menjadi instrumen penting bagi sektor publik untuk membiayai dan mengelola infrastruktur serta layanan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pendekatan *public private partnership* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau swasta dengan karakteristik kerjasama jangka panjang untuk menghasilkan sebuah produk dan jasa yang saling memberikan keuntungan termasuk menanggung resiko dan biayanya.

Oleh sebab itu, penanganan pengembangan sektor pariwisata memerlukan strategi yang tepat karena banyaknya potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya yang dimiliki. Agar potensi itu dapat dioptimalkan dan dikembangkan, diperlukan suatu usaha yang sungguh-sungguh serta kerjasama/ kemitraan yang erat diantara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam sektor pariwisata, seperti pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, pihak swasta dan masyarakat.

Konsep kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) memberikan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta membantu sektor pemerintah dalam menangani keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki dalam pengembangan sektor pariwisata. Melalui konsep kerjasama pemerintah dan swasta ini menjadi hal yang harus dimaksimalkan dalam mengatasi masalah kepariwisataan yang menunjang ketersediaan pelayanan publik di daerah wisata, dan juga komitmen perusahaan serta komunikasi dan partisipasi masyarakat yang rendah menjadi penghambat berkembangnya sebuah kepariwisataan.

Berangkat dari fenomena kasus yang terjadi diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul penelitian "*Publik Private Partnership* dalam Pengembangan Desa Wisata

Taman Edukasi Harus di Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.”

Rumusan Masalah

Dari fenomena latar belakang masalah yang sudah dicabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan *publik private partnership* dalam pengembangan desa wisata di Taman Edukasi Harus di Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *publik private partnership* dalam pengembangan desa wisata di Taman Edukasi Harus di Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan?

TINJAUAN PUSTAKA

Public Private Partnership Sebagai Kebijakan Publik

Public Private Partnership sebagai kebijakan public memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu menutup kesenjangan finansial (*financial gap*) yang terjadi akibat ketidakcukupan anggaran Pemerintahan Indonesia dalam membiayai infrastruktur. Adopsi skema penyediaan *Public Private Partnership* atau yang saat ini lebih dikenal dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) merupakan suatu pengadopsian kebijakan public (Nugroho, 2018).

Lebih lanjut lagi, (Nugroho, 2018) menjelaskan kebijakan *publik private partnership* yang mencakup lima dimensi yang harus dipemahaman yakni:

1. Keputusan pemerintah termasuk dalam hal ini Negara untuk mencapai tujuan atau visi nasional
2. Disektor infrastruktur public dengan memberikan sejumlah hak dan kewenangan sektor public ke sektor swasta.
3. Dalam konteks untuk menggerakkan masyarakat, memperkuat pasar, dan

menderegulasi atau mengurangi batasan-batasan.

4. Untuk membangun budaya kemandirian suatu bangsa dalam menyediakan infrastruktur yang diperlukan.
5. Dengan tambahan pemahaman, agar pemerintah dapat merelokasikan anggaran dari sektor infrastruktur ke sektor lainnya

Dari kelima dimensi tersebut diatas bahwa kebijakan dalam *publik private partnership* memperoleh justifikasi jika mencakup kelima dimensi diatas, jadi kebijakan *publik private partnership* dapat diukur berjalan baik dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dasar seperti dibawah ini (Nugroho, 2018), yakni :

1. Apakah kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan bangsa atau visi nasional, atautujuan dari elite politik, apakah kebijakan itu dibuat benar-benar untuk kepentingan bangsa atau kepentingan pribadi dan golongan yang disembunyikan dibalik kepentingan bangsa.
2. Apakah kebijakan tersebut telah memberikan secara secukupnya hak dan kewenangan, tidak kurang dan tidak lebih, pemerintah kepada sektor swasta atau pelaku usaha, atautujuan justru mengambil hak dan kewenangan pemerintah secara berlebihan sehingga pelaku bisnis dapat bertindak sewenang-wenang secara sak, baik secara tidak langsung maupun melalui tangan pemerintah.
3. Apakah kebijakan tersebut benar-benar menggerakkan masyarakat, memperkuat pasar, dan mengurangi batasan-batasan aturan yang tidak relevan, atau justru membuat pergerakan masyarakat terkunci, pasar menjadi tidak kompetitif, dan aturan makin memberatkan karena ditujukan untuk mendukung monopoli yang diberikan kepada pelaku usaha atas nama kebijakan *publik private partnership*.
4. Apakah pada akhirnya terbentuk budaya kemandirian dari masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk menyediakan sendiri kebutuhan infrastrukturnya daripada terus menerus menuntut pemerintah, atau justru akhirnya memperpanjang ketidak mandirian masyarakat.

5. Apakah dengan kebijakan *publik private partnership*, pemerintah dapat memindahkan anggaran infrastruktur ke anggaran sosial yang lebih memerlukan, ataupun tidak ada relokasi anggaran sama sekali.

Tipe dan Bentuk Public Privtte Patnership (PPP)

Kemitraan antara pemerintah dan swasta terkadang masih dipahami sebatas kerjasama yang terikat pada sebuah kontrak, padahal jika dikaji lebih dalam dalam kajian administrasi public, PPP berbeda dengan bentuk kerjasama seperti kontrak kerja, outsourcing maupun Wastanisasi. Kerjasama dalam bentuk kontrak kerja, outsourcing merupakan tipe kerjasama yang hanya memenuhi dan menyelesaikan permasalahan dari satu pihak saja. Kemitraan PPP merupakan kerjasama yang terbangun atas dasar komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama dengan mengerahkan berbagai sumberdaya dan kapasitas yang dimiliki para pihak aribat.

Lebih jelasnya dapat dijelaskan bahwa perdebaan antara *publik private partnership* dengan kerjasama lainnya dapat dilihat dari ungkapan dari (Purwanti, 2016) menyebutkan karakteristik dari kemitraan antara pemerintah dan swasta, antara lain:

1. Kerjasama melibatkan setidaknya-tidaknya satu lembaga pemerintah dan satu lembaga swasta.
2. Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama atau secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intensif.
3. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan procurement atau pelaksanaan tugas tertentu.
4. Memiliki orientasi jangka panjang.
5. Penyatuan, pemanfaatan, dan sinergi dari sumberdaya pemerintah dan swasta.
6. Berbagi resiko.
7. Perolehan dalam efisiensi dan efektivitas.

Secara sederhana *publik private partnership* adalah suatu kesepakatan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi sektor swasta di mana organisasi swasta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan produksi barang atau jasa publik yang secara umum disediakan oleh sektor publik dan di mana sektor swasta berbagi risiko dalam kerjasama tersebut. (Forrer, 2014) memberikan konsepsi yang mencirikan terkait *publik private partnership*, yakni:

1. Hubungan antara publik dan organisasi sektor swasta adalah jangka panjang, bukan hubungan satu kali, seperti yang mungkin terjadi dalam kontrak konvensional untuk barang atau jasa (seperti produk kantor atau bantuan kesekretariatan).
2. Sektor swasta bekerja sama dalam pengambilan keputusan tentang cara terbaik untuk menyediakan barang atau jasa publik dan produksi serta pengiriman barang atau jasa tersebut, yang biasanya menjadi domain sektor publik.
3. Hubungan tersebut melibatkan alokasi risiko yang dinegosiasikan antara sektor publik dan swasta, dimana pemerintah yang menanggung sebagian besar risiko.

Ukuran Keberhasilan Public Private Patnership (PPP)

Menurut (Hodge, 2010) membagi empat (4) ukuran keberhasilan *publik private patnership* sebaagimana berikut ini:

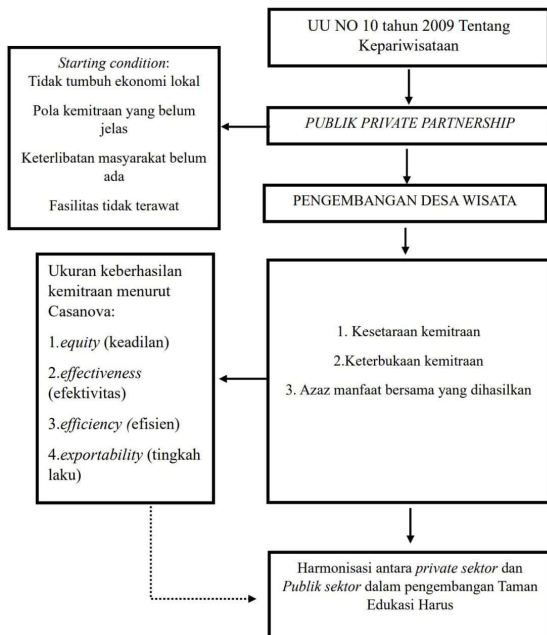
1. *Equity*, proyek dalam *Public Private Partnership* harus adil, artinya mereka yang menggunakan dan mendapatkan keuntungan dari penggunaan infrastruktur harus membayar biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan penggunaannya.
2. *Effectiveness*, mengacu pada masalah keuangan, pengawasan pendapatan, kualitas pelayanan dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa infrastruktur dan pelayanan publik disediakan dengan sebaikbaiknya dalam masa kemitraan.

Pemerintah sebagai *leading sector* pembangunan infrastruktur sektor publik perlu bersikap proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. *Efficiency, publik private partnership* dalam penyediaan dan pemeliharaan terbukti lebih efisien. Sektor swasta memiliki kemampuan yang baik dalam mengadaptasi teknologi, sehingga efisiensi pelayanan dapat tercapai.
4. *Exportability*, mengacu pada pergeseran alokasi risiko dari pemerintah ke swasta. Pemerintah tidak perlu menanggung kerugian untuk memberikan jaminan kepada swasta. Namun, sektor swasta harus memberikan keuntungan yang wajar, mekanisme pembiayaan yang disesuaikan dan transparan serta fleksibel dan risiko terkait yang ditanggung.

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: diolah peneliti, 2024

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini akan mengarahkan peneliti untuk mengikuti serta menginterpretasikan data sehingga tujuan penelitian dapat tercapai

melalui prosedur sistematis dengan pembuktian yang menyakinkan. Sebagaimana diketahui bahwa suatu ilmu tanpa metode dapat mengurangi kadar ilmiah itu sendiri sebab metode tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data bagi suatu ilmu saja melainkan untuk menguji kebenaran penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk pemahaman fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010).

Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi lapangan secara langsung (Arikunto, 2013).

Tabel Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Aparatur Desa	3
3	Private Sektor	1
4	Masyarakat	5

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder. Sumber data sekunder tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau melalui orang lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Pengumpulan data ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan permasalahan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi/ Pengamatan

(Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para Ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap sinergi antara pemerintah desa dan swasta dengan cara mencatat hasil dari kegiatan sinergi yang dilakukan antara pemerintah desa dan swasta dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat local. Alat bantu yang digunakan peneliti ialah smartphone agar dapat merekam, dapat mencari pemahaman lebih melalui internet dan media sosial, mengambil gambar melalui kamera serta alat tulis berupa kertas, pulpen untuk mencatat hal-hal penting yang ada di lapangan.

2. Wawancara

(Sugiyono, 2016) Mendefinisikan Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti berupa interview bebas, terpimpin dan interview bebas terpimpin dengan memberikan pertanyaan yang disediakan sebelumnya oleh peneliti namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa pertanyaan yang spontan yang dilakukan untuk memperjelas data yang diinginkan sehingga hasil yang didapat lebih terperinci.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini membutuhkan jawaban dari informan yang mendalam atau lebih terperinci, hal ini memungkinkan mendapatkan informasi secara lebih tepat dan akurat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan atau transkrip, buku seperti buku mengenai pemerintah desa, desa wisata dan surat kabar, majalah dan lain-lain. Dokumen sendiri bisa berbentuk tulisan-tulisan peneliti terdahulu, gambar mengenai lokasi dan juga kondisi Desa, atau karya-karya dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dokumentasi kegiatan dari sinergi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan swasta serta data lainnya yang mendukung. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada, literatur terkait dengan penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video dan literatur lainnya yang dianggap penting. Dokumentasi sendiri yang dilakukan penulis untuk memastikan apakah penelitian telah dilakukan.

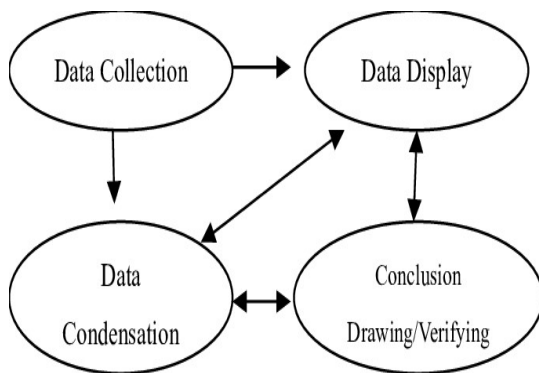
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data hasil merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting didalam suatu penelitian ilmiah, sebab dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian dan

mencapai tujuan akhir peneliti. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip (Sugiyono, 2016) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berikut adalah penjelasan analisis data yang dikemukakan oleh (Huberman, 2014), sebagai berikut:

Gambar 2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif



Sumber: (Huberman, 2014)

1. Data Collection

Peneliti dalam hal ini mengumpulkan tiga teknik pengumpulan data yakni Observasi (pengamatan) yang dilakukan berupa pengamatan terhadap sinergi antara pemerintah desa dan swasta. Adapun pengamatan dilakukan dengan cara mencatat hasil dari kegiatan sinergi yang dilakukan antara pemerintah desa dan swasta dalam pengembangan desa wisata sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal. *Interview* (wawancara) yang dilakukan berupa pertanyaan yang disediakan sebelumnya oleh peneliti dan juga beberapa pertanyaan yang spontan yang dilakukan untuk memperjelas data yang diinginkan sehingga hasil yang didapat lebih terperinci.

Dokumentasi yang dilakukan berupa cara mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang sudah ada, literatur terkait dengan penelitian baik dari buku, catatan harian, jurnal, dokumen, dokumentasi foto, video dan literatur lainnya yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan data yang diinginkan oleh peneliti di lapangan berbeda dan tidak berbentuk dokumen saja akan tetapi bisa berbentuk pernyataan maupun gambar. Oleh karena itu peneliti melakukan kegiatan wawancara untuk mendapatkan sebuah informasi yang mendalam dari beberapa informan terhadap pengamatan yang dilakukan peneliti, maupun dokumen yang didapatkan oleh peneliti. Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukannya berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan data dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian ini.

2. Data Condensation

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, data tersebut kemudian ditelaah. Data kasar yang telah ditemukan dilakukan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan ditransformasi menjadi rangkuman, tabel, maupun gambar disesuaikan dengan fokus dalam penelitian ini, yaitu bagaimana sinergi antara pihak swasta dengan pemerintah desa untuk mengembangkan taman menanti laburan.

3. Data Display

Penyajian data adalah sebuah bentuk analisis yang berisi tatanan yang teratur dari informasi yang didapatkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Data yang disajikan adalah dalam bentuk teks. Agar dapat menyajikan data dengan baik serta dapat menuju analisis kualitatif yang kuat maka data yang disajikan dapat berupa gambar atau foto yang didapatkan di lokasi penelitian. Hal tersebut digunakan untuk menyusun informasi sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan ataupun untuk melanjutkan proses yang selanjutnya sampai data yang disajikan

dapat berguna. Penyajian data juga tidak terlepas dari aktivitas analitik yaitu mendesain penyajian seperti menentukan data yang harus disajikan. Dalam penyajian data disarankan dapat menyajikan informasi yang kuat dan sistematis, dan mendorong penataan yang lebih inventif dan interaktif. Sehingga dalam proses penyajian data ini peneliti harus mengetahui apa yang seharusnya peneliti sajikan.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/verifying*)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menampilkan sekumpulan informasi yang telah tersusun sehingga dapat memberi pemahaman yang telah tersusun sehingga dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dan fenomena yang melingkupinya, kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul sampai pada pengumpulan data yang terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, penomoran, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, maka dengan penyajian data diharapkan mampu memberikan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya. Kondensasi data adalah proses memilih memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstrak data hasil dari catatan lapangan, wawancara, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan menggunakan kondensasi data akan menjadi lebih mantap dan kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Penerapan *Public Private Partnership* Dalam Pengembangan Desa Wisata Taman Edukasi Harus

Pemerintah desa telah berupaya keras mengembangkan desa wisata taman edukasi, yang memberikan dampak positif pada pendapatan bulanan desa. Berdasarkan *Public Private Partnership* yang ingin dilihat baik dalam pengembangannya nanti maka dalam

penelitian ini akan membahas 3 (tiga) point penting yang akan di uraikan yaitu:

a. Kesetaraan Dalam Bermitra

Kesetaraan dalam kemitraan melibatkan hak, kewajiban, dan peran yang setara antara semua pihak pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pengembangan Taman Edukasi Harus, PT Adaro dan pemerintah desa membagi tanggung jawab secara adil, dengan PT Adaro menangani pendanaan dan infrastruktur, dan pemerintah desa mengurus perizinan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, dan proyek dipantau serta dievaluasi secara rutin. Pertukaran informasi yang aktif dan penilaian berkala memastikan tujuan kemitraan tercapai, seperti terlihat dalam pembangunan gazebo oleh PT Adaro yang menunjukkan komitmen terhadap fasilitas umum dan manfaat bagi masyarakat.

b. Keterbukaan Dalam Bermitra

Keterbukaan dalam kemitraan menekankan transparansi dan akuntabilitas, memastikan semua pihak memiliki akses yang sama terhadap informasi kemitraan. Dalam pengembangan Taman Edukasi Harus, PT Adaro dan pemerintah desa menjaga keterbukaan informasi melalui pertemuan, papan pengumuman, dan media sosial. Setiap perkembangan proyek dilaporkan secara terbuka, dan mekanisme pelaporan serta evaluasi dilakukan secara berkala. Pengawasan kinerja melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan kemitraan berjalan baik dan sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan laporan bulanan dan forum akuntabilitas publik untuk memastikan manfaat maksimal bagi semua pihak, terutama masyarakat desa.

c. Azas Manfaat Bersama yang Dihasilkan Dalam Bermitra

Azas manfaat dalam kemitraan menekankan pada pembagian manfaat yang adil dan merata antara pemerintah desa,

sektor swasta, dan masyarakat. Dalam pengembangan Taman Edukasi Harus, manfaat dirasakan melalui peningkatan kapasitas, citra positif perusahaan, dan akses ke pendidikan serta peluang ekonomi. Indikator keberhasilan kemitraan meliputi peningkatan ekonomi, kualitas pendidikan, dan kepuasan masyarakat. Pemerintah desa memastikan manfaat berkelanjutan melalui program pemberdayaan, sedangkan PT Adaro fokus pada dukungan langsung seperti beasiswa dan pelatihan keterampilan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan manfaat yang diterima bersifat jangka panjang. Melalui indikator yang jelas dan program berkelanjutan, kemitraan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang merata bagi semua pihak yang terlibat.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Melakukan Upaya Pengembangan Desa Wisata Taman Edukasi Harus

- a. keterbatasan dana menjadi masalah signifikan dalam pengelolaan taman. Meskipun PT Adaro Indonesia telah memberikan dukungan finansial untuk pembangunan infrastruktur, biaya operasional sehari-hari seperti pemeliharaan dan program edukasi masih menjadi tantangan. Pemerintah desa dan PT Adaro sedang berupaya mencari solusi, termasuk mengembangkan program pendapatan mandiri. Masyarakat juga merasakan dampak dari keterbatasan dana, yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. sarana dan prasarana di Taman Edukasi Harus belum memadai. Fasilitas seperti toilet umum, tempat istirahat, dan akses jalan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Ketua Pokdarwis dan Sekretaris Desa menekankan perlunya dukungan tambahan untuk memperbaiki fasilitas, sementara masyarakat mengeluhkan fasilitas yang kurang bersih dan terbatas.

- c. kurangnya komunikasi antara Pokdarwis dan sektor wisata lainnya menjadi kendala dalam pengembangan taman. Kurangnya koordinasi sering menyebabkan informasi tidak sampai dengan baik, menghambat pelaksanaan program secara optimal. PT Adaro telah mengadakan workshop untuk meningkatkan komunikasi, namun masyarakat merasa tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengembangan.

Pembahasan

Bedasarkan hasil penelitian tentang *Public Private Partnership* berikut merupakan bentuk penerapan PPP dalam pengembangan Desa Wisata Taman Edukasi Harus pada Desa Harus Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kesetaraan Kemitraan:

- a. **Equity (Keadilan):** Menurut (Kasali, 2017) keadilan dalam kemitraan melibatkan distribusi manfaat dan tanggung jawab yang adil di antara semua pihak. Partisipasi masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan memastikan keadilan sosial dan ekonomi. Studi-studi sebelumnya (Bramwell, 2000) dan (Dredge, 2006) menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dan transparansi untuk mencapai kesetaraan. Di Taman Edukasi Harus, kemitraan antara pemerintah desa dan PT Adaro menunjukkan penerapan prinsip keadilan melalui pembagian tanggung jawab yang jelas dan partisipasi masyarakat dalam keputusan, yang menghasilkan manfaat merata bagi semua pihak.
- b. **Effectiveness (Efektivitas):** Kemitraan dengan PT Adaro telah meningkatkan infrastruktur dan fasilitas wisata di Taman Edukasi Harus, menarik lebih banyak pengunjung. Studi sebelumnya (Wibisono, 2017) dan (Raharjo, 2019) menunjukkan bahwa kemitraan yang efektif didukung oleh komunikasi yang jelas, partisipasi masyarakat, dan tujuan bersama. Di Taman

- Edukasi Harus, keputusan kolaboratif dan program-program pelatihan telah meningkatkan kapasitas lokal, menunjukkan bahwa efektivitas kemitraan ini tercapai melalui integrasi berbagai kepentingan dan penggunaan sumber daya yang optimal.
- c. **Efficiency (Efisiensi):** Efisiensi dalam kemitraan ini terlihat dari penggunaan sumber daya yang optimal, termasuk teknologi dan peningkatan kapasitas SDM, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Studi (Prasojo, 2015) dan (Wibisono, 2017) menekankan pentingnya teknologi dan manajemen yang baik dalam meningkatkan efisiensi. Di Taman Edukasi Harus, meskipun ada tantangan keterbatasan dana, pengelolaan keuangan yang baik dan penggunaan teknologi telah membantu meningkatkan operasional dan pelayanan, mendukung pengembangan taman sebagai destinasi wisata berkelanjutan.
 - d. **Exportability (Tingkah Laku):** Tingkah laku etis, seperti transparansi dan kejujuran, penting dalam kemitraan untuk mencapai tujuan bersama. Studi sebelumnya (Handayani, 2018) menekankan pentingnya etika dalam kemitraan. Di Taman Edukasi Harus, komunikasi terbuka dan sikap saling menghormati telah memperkuat kemitraan antara pemerintah desa, PT Adaro, dan masyarakat, mendukung keberhasilan pengembangan taman sebagai destinasi wisata edukasi yang bermanfaat bagi semua pihak.
2. **Keterbukaan Dalam Bermitra**
- a. **Equity (Keadilan)** Penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam distribusi manfaat pengembangan destinasi wisata meningkatkan dukungan masyarakat dan keberhasilan proyek. Meskipun ada upaya untuk pembagian peran yang adil antara pemerintah desa dan PT Adaro, masyarakat merasa distribusi manfaat dan informasi masih belum merata. Ada kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi dan akses informasi agar semua anggota komunitas memahami dan merasakan manfaat yang dihasilkan. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebar secara adil di seluruh komunitas.
 - b. **Effectiveness (Efektivitas)** Efektivitas kemitraan dalam pengembangan Taman Edukasi Harus dipengaruhi oleh transparansi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program. Proses pengambilan keputusan yang terbuka memungkinkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk memberikan masukan yang relevan. Evaluasi yang transparan juga membantu menilai keberhasilan program, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal, dan bahwa keputusan mencerminkan kepentingan bersama.
 - c. **Efficiency (Efisiensi)** Keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional. Partisipasi aktif masyarakat dan komunikasi terbuka memungkinkan identifikasi masalah secara dini dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Mekanisme umpan balik dan pelaporan yang terbuka membantu menjaga kepercayaan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif, mendukung tujuan pengembangan yang lebih berkelanjutan.
 - d. **Exportability (Tingkah Laku)** Integritas, transparansi, dan komunikasi terbuka antara pemerintah desa, PT Adaro, dan masyarakat adalah fondasi penting dalam kemitraan. Kejujuran dalam komunikasi dan saling menghormati membantu membangun kepercayaan dan menyelesaikan konflik secara efektif. Sikap ramah masyarakat terhadap wisatawan dan komitmen terhadap

keberlanjutan mendukung keberhasilan jangka panjang proyek. Praktik-praktik ini memastikan bahwa kemitraan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

3. Azaz Manfaat Bersama yang Dihasilkan

- a. **Equity (Keadilan):** Keadilan dalam pengembangan pariwisata mencakup distribusi pendapatan, akses fasilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun pendapatan dari pariwisata digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan, distribusi yang lebih merata dan partisipasi masyarakat yang optimal masih perlu ditingkatkan. Pembagian tanggung jawab antara pemerintah desa dan PT Adaro juga perlu lebih seimbang, terutama dalam hal kontrol sumber daya.
- b. **Effectiveness (Efektivitas):** Efektivitas pengembangan pariwisata diukur dari pencapaian tujuan seperti peningkatan kunjungan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Taman Edukasi Harus, fasilitas baru seperti kolam renang berhasil menarik wisatawan kembali, namun pelestarian lingkungan dan pelatihan masyarakat masih memerlukan evaluasi dan peningkatan.
- c. **Efficiency (Efisiensi):** Efisiensi mencakup penggunaan sumber daya yang optimal, transparansi keuangan, dan penggunaan teknologi. Meskipun ada peningkatan dalam transparansi penggunaan dana, penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi proyek masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan lebih efisien.
- d. **Exportability (Tingkah Laku):** Tingkah laku yang diharapkan mencakup pelestarian lingkungan, kepatuhan regulasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Ada peningkatan dalam transparansi penggunaan dana dan penggunaan teknologi, tetapi kesadaran masyarakat dalam praktik ramah

lingkungan perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, diperlukan peningkatan dalam keseimbangan tanggung jawab, efektivitas program, efisiensi sumber daya, dan tingkah laku yang lebih terbuka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kemitraan publik-swasta dalam pengembangan Desa Wisata Taman Edukasi Harus berjalan efektif, dengan penerapan prinsip kesetaraan dan keterbukaan. Kemitraan ini ditandai dengan perjanjian kerjasama yang jelas, pembagian tanggung jawab yang adil, serta keterlibatan aktif semua pihak dalam pengambilan keputusan dan evaluasi.
2. Meskipun prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik, masih terdapat kendala, seperti tantangan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan komitmen jangka panjang. Namun, kendala ini dapat diatasi melalui evaluasi rutin dan komunikasi yang efektif.

SARAN

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang muncul dalam pengembangan desa wisata di Taman Edukasi Harus di Desa Harus, Untuk memperkuat kemitraan dalam pengembangan Taman Edukasi Harus, beberapa saran dapat diimplementasikan

1. Perkuat Komitmen: Secara berkala mengkaji dan memperbarui perjanjian kerjasama untuk menjaga kesetaraan dan keterlibatan aktif semua pihak, serta meningkatkan transparansi informasi.
2. Pengawasan dan Evaluasi: Lakukan evaluasi rutin dengan indikator kinerja yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

3. Pemberdayaan Masyarakat: Tingkatkan program pemberdayaan masyarakat dan pastikan manfaat kemitraan didistribusikan secara adil.
4. Inovasi dan Keberlanjutan: Dorong inovasi, diversifikasi pendanaan, dan sinergi dengan pemangku kepentingan lain untuk memastikan keberlanjutan proyek Taman Edukasi Harus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bramwell, &. B. (2000). *Tourism Collaboration and Partnerships* . Bristol: Channel View Publicationv.
- Dredge, D. (2006). Networks, Conflict and Collaborative Communities. *Journal of Sustainable Tourism*.
- Forrer, J. J. (2014). *Governing Cross-Sector Collaboration*. Washington DC: PB Printing.
- Handayani, I. &. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Public Private Partnership (PPP) pada Pengelolaan Sampah di Indonesia: Perspektif New Public Management. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), , 98-108.
- Hodge, G. A. (2010). *International handbook on public-private partnership*. Edward Elgar Publishing.
- Huberman, M. ., (2014). *Qualitatif Data Analysis*. Jakarta: UI Press.
- Kasali, R. (2017). *Manajemen Public Relations*. . Jakarta: PT Pustaka.
- Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Nugroho, A. A. (2018). Kebijakan Public Private Partnership di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Tata Kota dan Daerah* , 10(1), 1-12.
- Prasojo, E. &. (2015). Model Keberhasilan Kebijakan Public Private Partnership (PPP) di Indonesia: Kasus Proyek Jalan Tol Trans Jawa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 52-60.
- Purwanti, N. D. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Raharjo, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Public Private Partnership (PPP) dalam Pembangunan Infrastruktur Perhubungan di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 37-46.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibisono, B. &. (2017). Analisis Kebijakan Public Private Partnership (PPP) pada Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. . *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 107-116.